

Urgensi Pembangunan Koperasi

Oleh Purwoko

TIDAK tertatanya pembangunan koperasi Indonesia membuat keberadaan koperasi seolah hanya di etalase yang hanya dikeluarkan jika dibutuhkan. Koperasi diingat saat kampanye, koperasi dibanggakan saat sedang krisis, dan koperasi masih dianggap sebagai badan usaha pinggiran yang tidak memiliki prospek yang spektakuler.

Bukti tidak tertatanya pembangunan koperasi adalah keputusan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang menutup sebanyak 81.686 koperasi (2016-2019). Sudah saatnya Indonesia memiliki standar ukuran keberhasilan pembangunan koperasi pada suatu wilayah tertentu dengan menggunakan metode Indeks Pembangunan Koperasi (IPK). Seberapa besar urgensi IPK bagi pembangunan koperasi Indonesia?

IPK dapat digunakan untuk memberikan penghargaan atas keberhasilan pembangunan koperasi dan IPK juga akan memacu, memotivasi dan meningkatkan peran dan keberpihakan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam pembangunan koperasi di daerahnya. IPK akan mempermudah pemerintah untuk introspeksi diri apakah kepedulian dan keberpihakan terhadap koperasi sudah baik atau belum. Penilaian IPK harus dilakukan oleh lembaga independen di luar pemerintah yang memiliki kompetensi dan memiliki pengetahuan serta pengalaman dalam menjalankan usaha koperasi agar hasil penilaian lebih obyektif. Penilaian IPK harus dikordinasikan dengan Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) yang merupakan satu-satunya organisasi gerakan koperasi di Indonesia menurut Undang-Undang Nomer 25 Tahun 1992.

Tujuan pelaksanaan penilaian IPK adalah untuk memacu dan memotivasi pemerintah untuk serius memperhatikan badan usaha koperasi, meningkatkan peran dan keberpihakan pemerintah (pusat, provinsi dan kabupaten/kota) dan para pemangku kepentingan dalam pembangunan koperasi, meningkat-



kan pembinaan dan pengawasan terhadap koperasi, menjalin kerja sama lintas tingkatan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, dan lintas instansi sektoral dalam pembangunan koperasi, serta memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan pembangunan koperasi di wilayah yang bersangkutan.

Jika selama ini koperasi dibiarkan begitu saja tumbuh dan berkembang karena perhatian pemerintah yang masih minim, maka tidak mengherankan jika banyak koperasi yang gulung tikar, bahkan banyak koperasi yang dipergunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Contohnya, untuk menghimpun dana masyarakat. Koperasi hanya dijadikan kedok untuk melakukan praktik investasi bodong yang meresahkan dan merugikan masyarakat.

Pemerintah selama ini baru terhenyak sadar tatkala masyarakat berteriak kalau ada koperasi yang tidak mampu mengembalikan simpanan anggota. Nampak sekali pemerintah tidak memahami peran dan tanggungjawabnya terhadap pembangunan koperasi. Oleh karena itu, sekarang saatnya untuk membuat pedoman penilaian IPK agar koperasi tidak hanya menjadi bahan kampanye, tetapi benar-benar kehadiran koperasi dapat membantu memenuhi kebutuhan anggotanya.

Kompetensi SDM

Beberapa indikator yang terkait dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang dapat dijadikan dasar

penilaian IPK antara lain: kebijakan pemerintah terkait pembangunan koperasi serta penciptaan iklim usaha yang kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan koperasi. Kemudian alokasi anggaran untuk bidang perkoperasian, nomenklatur dinas yang membidangi koperasi, kecukupan dan kemampuan serta sumber daya manusia (SDM) pembina koperasi. Selain itu dukungan sarana dan prasarana ekonomi dan sosial, serta dukungan sarana konsultasi dan pendampingan bagi koperasi baru maupun koperasi yang sedang menghadapi masalah.

Sementara indikator penilaian yang terkait dengan proses implementasi keberpihakan pemerintah terhadap koperasi, antara lain: proses pelayanan perizinan pendirian dan izin usaha koperasi, penyediaan fasilitas kemitraan antara usaha besar dengan koperasi dan kemitraan antara koperasi dengan koperasi, menjembatani akses pembiayaan bagi koperasi dengan melibatkan pihak perbankan atau lembaga pembiayaan nonbank, keseriusan pemerintah mengembangkan sarana usaha bersama, melaksanakan pendidikan perkoperasian dan manajemen usaha, serta membantu koperasi untuk melakukan promosi.

Kemudian hasil dari IPK yang dapat dijadikan indikator penilaian adalah meningkatnya jumlah koperasi aktif yang ditandai dengan keberlangsungan usaha koperasi dan pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT), menurunkan koperasi yang mati atau dibubarkan karena pasif, penambahan jumlah anggota, seberapa besar kontribusi koperasi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan jumlah penyerapan tenaga kerja.

Jika pemerintah tidak serius untuk membangun ekonomi koperasi, tidak mustahil koperasi Indonesia hanya tinggal cerita belaka. Dibutuhkan kompetensi SDM pembina dan pengawas koperasi yang dimulai dari kompetensi para pejabat dan pegawai yang ditempatkan di instansi atau lembaga yang menaungi koperasi. Mulai dari Kementerian Koperasi dan dinas yang membidangi koperasi (pemerintah provinsi dan pemerintah

Jika selama ini koperasi dibiarkan begitu saja tumbuh dan berkembang karena perhatian pemerintah yang masih minim, maka tidak mengherankan jika banyak koperasi yang gulung tikar bahkan banyak koperasi yang dipergunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

kota/kabupaten).

Saat ini seolah mencari barang langka jika akan mencari pejabat di instansi atau dinas koperasi yang benar-benar paham tentang koperasi karena pejabat yang ditugaskan memiliki latar belakang yang tidak terkait sama sekali dengan koperasi. Pada saat menjabat baru belajar, setelah sedikit paham koperasi sudah memasuki masa pensiun atau dipindahtugaskan.

Meningkatkan IPK juga tergantung kualitas Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) sebagai organisasi gerakan koperasi yang salah satu tugasnya memberikan masukan kepada pemerintah tentang strategi pembangunan koperasi Indonesia. Namun saat ini Dekopin justru menjadi rebutan oleh orang-orang yang seolah peduli terhadap koperasi, padahal ada tujuan politik tertentu dengan menjabat di Dekopin. Jika Dekopinnya saja berebut kekuasaan bagaimana mungkin pembangunan koperasi bisa berjalan dengan baik. (46)

— Dr Purwoko MM, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Ahmad Dahlan, Ketua Asosiasi Koperasi Pati